



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

# **DINAS PERHUBUNGAN**

**JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239**

**Email : dishubpesisirselatan2017@gmail.com**

---

## **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 821/002/Kpts/Dishub-PS/2022**

## **TENTANG**

**PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA**

**TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

**DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/20/Kpts-BPT-PS/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU** : Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lajur 2 dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : ***Tugas kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sbb :***
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
  2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan
  3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 03 Januari 2022  
KEPALA DINAS



**SYAFRI ONI, SH. M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 821/002/Kpts/Dishub-PS/2022**  
**TANGGAL : 03 JANUARI 2022**  
**TENTANG : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 821/002/Kpts/Dishub-PS/2022 TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PELAKSANA**  
**TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP/GOL.	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	<b>VERAWATI, S.Sos</b> 19760605 200801 2 029 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PPTK	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> <b>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <b>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e. Fasilitas Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <b>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <b>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> <b>1. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

1	2	3	4	5
2.	<b>RENO EFFENDI, S.Sos</b> 19801115 200701 1 003 Penata Muda (III/a)	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PPTK	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> <b>1. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan <b>2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.	<b>DASRIL, SH</b> 19681207 200212 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Lalu Lintas	PPTK	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)</b> <b>1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
4.	<b>YENDRA RIVA'I, ST</b> 19730307 200701 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Kebijakan	PPTK	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)</b> <b>1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor b. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5.	<b>ADE PUTRA, S.Sos</b> 19840417 200701 1 002 Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Angkutan	PPTK	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)</b> <b>1. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan

1	2	3	4	5
6.	<b>NOFRIZON, S.Sos</b> 19711106 200701 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pj. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	PPTK	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)</b> <b>1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
7.	<b>DEDI HARISANDU, SE</b> 19850131 200801 1 003 Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Pembangunan Prasarana	PPTK	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)</b> <b>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pembangunan Penerangan Jalan Umum b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan - Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
8.	<b>ARLIM ARIF</b> 19660621 199003 1 008 Penata (III/c)	Staf Seksi Pengoperasian Prasarana	PPTK	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)</b> <b>1. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota - Pelayanan Terminal dan Perparkiran (Operasional Pelayanan Terminal dan Perparkiran)
9.	<b>RAFLENOVA YULANDA,SE</b> 19760719 200501 1 012 Penata (III/c)	Kepala Seksi Pemasukan Moda dan Teknologi Perhubungan	PPTK	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b> <b>1. Penetapan Lintas Pelayaran dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Pelayaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
10.	<b>YHOHANA RIZA, SH.M.Si</b> 19650808 199303 2 006 Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan	PPTK	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)</b> <b>1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
11.	<b>ERMAN JUSA, SH</b> 19730301 199403 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Keselamatan	PPTK	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b> <b>1. Penetapan Lintas Pelayaran dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>Sub Kegiatan :</b> a Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan dan Pengendalian LLAL (Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut)



KEPALA DINAS

**SYAFRIJONI, SH. M.Si**

Pembina (IV/a)

NIP. 19680906 199308 1 001